



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Maret 2019/Periodik - 2018)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
SUB UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IRSYADI
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 96984

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 1.350.000.000**

1. Tanah Seluas 5300 m2 di PASAMAN BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
2. Tanah Seluas 20000 m2 di PASAMAN BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
3. Tanah Seluas 10000 m2 di PASAMAN BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
4. Tanah Seluas 5000 m2 di PASAMAN BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 55000 m2/36 m2 di PASAMAN BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 280 m2/192 m2 di PASAMAN BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/21 m2 di KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**Rp. 113.000.000**

1. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOBIL, TOYOTA AGYA Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000
3. MOTOR, HONDA CB150R Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000



C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	393.970.846
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.856.970.846
III. HUTANG	Rp.	316.200.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.540.770.846

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **3 Juli 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.